

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Masalah tindakan koordinasi kerja horizontal atau intenal Bamuskam dengan Pemerintahan Kampung Wakde-Aperma kurang maksimal dilakukan. Hanya sesekali dilakukan bersama-sama kepala-kepala urusan pemerintahan kampung melalui rapat bersama-sama masyarakat. Demi pencalonan dan pemilihan kepala kampung dan ketua Bamuskam guna mengisi kekosongan jabatan aparat kampung. Koordinasi internal di dalam lembaga Bamuskam dengan pemerintahan kampung dilakukan pada saat tertentu membahas program kerja Musrebang untuk mengatasi dan mencegah masalah-masalah kekacauan, percecokan, kekosongan jabatan serta program kerja di Kampung Wakde-Aperma.

6.1.2. Lebih banyak komunikasi lisan melalui elektronik daripada komunikasi administrasi organisasi Bamuskan dengan pemerintahan kampung. Komunikasi tertulis dalam administrasi lebih lambat daripada komunikasi lisan untuk koordinasi antara lembaga kampung tidak tepat waktu. Komunikasi lisan lebih cepat dipatuhi daripada komunikasi tertulis administrasi dan sangat tidak dipatuhi oleh anggota Bamuskam dan kaur-kaur pemerintahan kampung yang lebih kebanyakan jam karet, rapat tidak tepat waktu. Komunkasi administrasi tidak lengkap dan tidak dimengerti itu merupakan potensi ketidak-mampuan pengurus Bamuskam untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kampung, karena faktor situasi

dan kondisi kurang memahami Tupoksi. Faktor tindakan rapat-rapat Bamuskam antara rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundangan yang tidak teratur dilakukan oleh aparat lembaga ini di kampung Wakde-Aperma. Faktor jumlah rapat pemerintah kampung untuk bisa mengetahui jumlah keseluruhan masyarakat dan selalu tidak aktif dalam kegiatan dalam rapat-rapat pemerintahan kampung dan Bamuskam sangat tidak diperhatikan.

6.2. Saran

- 6.2.1.** Diharapkan agar tindakan koordinasi kerja horizontal atau intenal Bamuskam dengan pemerintahan Kampung Wakde-Aperma kurang maksimal dilakukan agar diperbaiki. Karena sesekali dilakukan bersama-sama kepala-kepala urusan pemerintahan kampung melalui rapat dengan masyarakat. Bukan demi pencalonan dan pemilihan kepala kampung dan ketua Bamuskam guna mengisi kekosongan jabatan aparat kampung. Koordinasi internal di dalam lembaga Bamuskam dengan pemerintahan kampung dilakukan pada saat membahas program kerja Musrembang demi mengatasi dan mencegah masalah-masalah kekacuan, percecokan, kekosongan jabatan serta program kerja di Kampung Wakde-Aperma.
- 6.2.2.** Diharapkan agar komunikasi lisan melalui elektronik diperkuat dengan komunikasi administrasi organisasi Bamuskan dan pemerintahan kampung. Komunikasi tertulis dalam administrasi yang lambat selama ini diperbaiki pula asalkan ditambahkan dengan komunikasi lisan-elektronik demi memperkuat koordinasi antara lembaga kampung yang tidak tepat

waktu. Komunikasi lisan lebih cepat dipatuhi harus didukung pula dengan komunikasi tertulis administrasi yang lebih tepat waktu dan sangat dipatuhi oleh anggota Bamuskam dan kaur-kaur pemerintahan kampung. Komunikasi administrasi yang tidak lengkap dan tidak dimengerti diperbaiki agar memampukan Bamuskam guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kampung, sebagai akibat dari faktor situasi dan kondisi kurang memahami Tupoksi. Perbaikan tindakan rapat-rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundangan yang teratur dilakukan oleh aparat lembaga di kampung Wakde-Aperma. Jumlah dan sifat rapat diperbaiki sebagai faktor penentu utama untuk koordinasi dan komunikasi administrasi agar mengetahui tuntutan masyarakat yang selama ini tidak aktif menjadi efektif antara aparat pemerintahan kampung dan Bamuskam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Faried. H., 2015. *Teori dan Konsep Administrasi, dari Pemikiran Paradigma Menuju Redefinisi*. Pn.PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fenny Damayanti & D..J. Priansa. 2015. *Administrasi & Operasional Perkantoran*. Alfabeta. Bandung.
- Hasibuan Malayu.S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Pn.Bumi Aksara. Jakarta.
- Herlambang Susatyo. 2014. *Perilaku Organisasi*. Gosityem Publishing. Yogyakarta.
- Ig. Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Pn. Andi. Yogyakarta.
- Moleong. L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Pn. Alfabeta. Bandung.
- S.P. Siagian, 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Pn.Bumi Aksara. Jakarta
- Sayuti Abdul Jalaludin. 2013. *Manajemen Perkantoran Praktis*. Alfabeta. Bandung.
- Sedianingsih,dkk. 2014. *Teori Dan Praktik Adminstrasi Kesekretariatan*. Pn. Kencana Predana Media Grup. Jakarta.
- Soetopo Hendyat, 2012. *Perilaku Organisasi Teori Dan Praktik Di Bidang Pendidikan*. Pn. Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Peneltian Administrasi*. Pn. Alfabeta. Bandung.
- Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Organisasi*. Pn.Gajah Mada university Press. Yogyakarta
- Suwarto.F.X. 1999. *Perilaku Organissi*. Pn. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Stoner James A.F. 1990. *Manajemen*. Penerjemah: Alfonsus Sirait . Pn. Erlangga. Jakarta.

Tathagati Arini Tathagati., 2014. *Step By Step Membuat Standard Operating Procedure*. Pn. Efata Publisihing. Jakarta.

The Liang Gie., 1981. *Kamus Administrasi Perkantoran*. Edisi ke-3. Pn. Nur Cahaya. Yogyakarta.

Umam Khairul. 2014. *Manajemen Perkantoran*. Pn. Pustaka Pelajar. Bandung.

B. DOKUMEN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

